1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. Perkembangan Inflasi Daerah dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kota Sungai Penuh selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami fluktuasi cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan harga konsumen selama bulan Januari, Februari dan Maret 2026, perubahan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah, sedangkan sebagian besar komoditas lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan harga.

Secara umum, perkembangan harga pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kecenderungan **menurun pada beberapa komoditas pangan strategis**, terutama cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, kedelai, gula pasir dan garam. Penurunan tersebut memberikan dampak positif terhadap pengendalian tekanan inflasi daerah.

Sebaliknya, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, antara lain cabai merah keriting, ikan tongkol dan daging sapi. Kenaikan tersebut perlu tetap menjadi perhatian karena komoditas pangan yang bersifat mudah rusak dan bergantung pada pasokan dari luar daerah relatif lebih rentan mengalami perubahan harga.

B. Perkembangan Harga Bulanan

Berdasarkan hasil pengolahan data harga konsumen, perkembangan rata-rata harga beberapa komoditas utama selama Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Komoditas	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	Perubahan Jan–Mar
Beras Ciwilis	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	0,0%
Beras Solok Putih	Rp15.625	Rp15.625	Rp15.625	0,0%
Beras Kusut	Rp16.250	Rp16.250	Rp16.250	0,0%
Beras Pandan Wangi	Rp16.250	Rp16.250	Rp16.250	0,0%
Beras SPHP	Rp13.100	Rp13.100	Rp13.100	0,0%
Kedelai biji kering impor	Rp13.000	Rp12.100	Rp11.200	**-13,8%**
Bawang merah	Rp36.833	Rp31.786	Rp28.214	**-23,4%**
Bawang putih bonggol	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	0,0%
Cabai merah keriting	Rp30.433	Rp40.143	Rp39.286	**+29,1%**
Cabai rawit merah	Rp67.000	Rp47.071	Rp33.929	**-49,4%**
Daging sapi murni	Rp140.000	Rp141.429	Rp142.143	**+1,5%**
Daging ayam ras	Rp48.000	Rp45.750	Rp42.429	**-11,6%**
Telur ayam ras	Rp28.933	Rp27.214	Rp26.357	**-8,9%**
Gula pasir konsumsi	Rp18.000	Rp17.893	Rp17.500	**-2,8%**

Minyak goreng kemasan sederhana	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	0,0%
Minyak goreng curah	Rp19.000	Rp19.000	Rp19.000	0,0%
Tepung terigu curah	Rp9.000	Rp9.000	Rp9.000	0,0%
Ikan tongkol	Rp30.000	Rp33.750	Rp32.679	**+8,9%**
Garam halus beryodium	Rp14.000	Rp12.857	Rp12.857	**-8,2%**
Tepung terigu kemasan	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	0,0%

C. Perkembangan Harga Komoditas Strategis

1. Komoditas Beras

Harga beberapa jenis beras yang tercatat dalam panel harga relatif stabil sepanjang Triwulan I Tahun 2026. Beras Ciwilis berada pada kisaran Rp15.000/kg, Beras Solok Putih sekitar Rp15.625/kg, Beras Kusut dan Beras Pandan Wangi sekitar Rp16.250/kg, sedangkan Beras SPHP berada pada Rp13.100/kg.

Stabilnya harga beras menunjukkan bahwa pasokan beras pada periode tersebut relatif terjaga. Keberadaan beras SPHP dengan harga yang relatif stabil juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Namun demikian, data untuk Beras Premium dan Beras Medium pada panel yang disampaikan tercatat kosong/tidak tersedia, sehingga belum dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan kedua komoditas tersebut.

2. Cabai Merah Keriting

Cabai merah keriting merupakan salah satu komoditas yang mengalami tekanan harga selama Triwulan I. Rata-rata harga meningkat dari sekitar Rp30.433/kg pada Januari menjadi Rp40.143/kg pada Februari dan sedikit turun menjadi Rp39.286/kg pada Maret.

Secara keseluruhan, rata-rata harga Maret masih sekitar **29,1 persen lebih tinggi dibandingkan Januari**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cabai merah keriting masih menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.

3. Cabai Rawit Merah

Berbeda dengan cabai merah keriting, cabai rawit merah mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Rata-rata harga turun dari sekitar **Rp67.000/kg pada Januari menjadi Rp47.071/kg pada Februari dan Rp33.929/kg pada Maret**.

Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar **49,4 persen dibandingkan Januari**. Penurunan tersebut merupakan salah satu perkembangan harga yang paling signifikan selama Triwulan I dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilisasi harga pangan.

4. Bawang Merah

Harga bawang merah menunjukkan tren penurunan secara konsisten, yaitu dari rata-rata sekitar Rp36.833/kg pada Januari menjadi Rp31.786/kg pada Februari dan Rp28.214/kg pada

Maret.

Secara keseluruhan, harga rata-rata bawang merah pada Maret turun sekitar **23,4 persen dibandingkan Januari**. Penurunan ini menunjukkan perbaikan pasokan dan relatif terkendalinya permintaan maupun distribusi bawang merah pada periode tersebut.

5. Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Harga daging ayam ras juga menunjukkan tren penurunan dari Rp48.000/kg pada Januari menjadi Rp45.750/kg pada Februari dan Rp42.429/kg pada Maret atau turun sekitar **11,6 persen** dibandingkan Januari.

Sementara itu, harga telur ayam ras turun dari sekitar Rp28.933/kg pada Januari menjadi Rp27.214/kg pada Februari dan Rp26.357/kg pada Maret atau mengalami penurunan sekitar **8,9 persen**.

Penurunan harga kedua komoditas tersebut menjadi perkembangan positif karena daging ayam ras dan telur ayam ras merupakan komoditas pangan yang memiliki tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi.

6. Daging Sapi

Harga daging sapi relatif tinggi dan cenderung meningkat secara bertahap, yaitu dari sekitar Rp140.000/kg pada Januari menjadi Rp141.429/kg pada Februari dan Rp142.143/kg pada Maret.

Meskipun kenaikannya relatif kecil, yaitu sekitar **1,5 persen dibandingkan Januari**, komoditas daging sapi tetap perlu dipantau, terutama pada periode meningkatnya permintaan masyarakat menjelang dan selama hari besar keagamaan.

7. Ikan Tongkol

Harga ikan tongkol mengalami kenaikan dari sekitar Rp30.000/kg pada Januari menjadi Rp33.750/kg pada Februari, kemudian sedikit turun menjadi Rp32.679/kg pada Maret.

Secara keseluruhan, harga Maret masih sekitar **8,9 persen lebih tinggi dibandingkan Januari**. Perubahan harga ikan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, hasil tangkapan, distribusi dan biaya transportasi.

8. Komoditas Lainnya

Harga bawang putih bonggol, minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng curah, tepung terigu curah, tepung terigu kemasan serta beberapa jenis beras relatif stabil selama Triwulan I Tahun 2026.

Kedelai biji kering impor mengalami penurunan dari Rp13.000/kg pada Januari menjadi Rp12.100/kg pada Februari dan Rp11.200/kg pada Maret atau turun sekitar **13,8 persen**.

Gula pasir konsumsi juga mengalami penurunan secara bertahap dari Rp18.000/kg menjadi Rp17.500/kg atau turun sekitar **2,8 persen**. Sementara garam halus beryodium turun dari Rp14.000/kg menjadi sekitar Rp12.857/kg.

D. Komoditas yang Mengalami Perubahan Signifikan

Berdasarkan perbandingan harga rata-rata Januari dengan Maret 2026, komoditas yang mengalami perubahan paling signifikan adalah:

Komoditas yang mengalami penurunan harga:

1. Cabai rawit merah: turun sekitar 49,4 persen;
2. Bawang merah: turun sekitar 23,4 persen;
3. Kedelai biji kering impor: turun sekitar 13,8 persen;
4. Daging ayam ras: turun sekitar 11,6 persen;
5. Telur ayam ras: turun sekitar 8,9 persen;
6. Garam halus beryodium: turun sekitar 8,2 persen;
7. Gula pasir konsumsi: turun sekitar 2,8 persen.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga:

1. Cabai merah keriting: naik sekitar 29,1 persen;
2. Ikan tongkol: naik sekitar 8,9 persen;
3. Daging sapi murni: naik sekitar 1,5 persen.

Sementara komoditas seperti beras, bawang putih, minyak goreng dan tepung terigu cenderung stabil.

E. Perkembangan Inflasi Daerah

Berdasarkan perkembangan harga tersebut, tekanan inflasi pangan di Kota Sungai Penuh pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum **relatif terkendali**, ditandai dengan penurunan harga pada sejumlah komoditas strategis.

Tekanan kenaikan harga terutama berasal dari **cabai merah keriting, ikan tongkol dan daging sapi**. Namun tekanan tersebut relatif terkompensasi oleh penurunan harga pada cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, kedelai, gula dan garam.

Dengan demikian, dari sisi pemantauan harga pangan, kondisi Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa **stabilitas harga relatif terjaga**, meskipun komoditas hortikultura tetap memiliki tingkat volatilitas yang tinggi.

Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan tersebut merupakan gambaran berdasarkan **perkembangan harga panel konsumen**, bukan pengukuran angka inflasi resmi. Untuk menyatakan angka inflasi Kota Sungai Penuh, tetap diperlukan data dan publikasi inflasi resmi dari BPS.

F. Risiko dan Potensi Tekanan Harga ke Depan

Memasuki periode berikutnya, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui TPID, antara lain:

1. Risiko kenaikan harga cabai

Cabai merah keriting masih menunjukkan harga yang relatif tinggi dibandingkan Januari.

Komoditas cabai juga sangat sensitif terhadap perubahan produksi, cuaca dan kelancaran distribusi. Penurunan harga cabai rawit yang cukup besar perlu dipertahankan dengan menjaga kontinuitas pasokan.

2. Risiko gangguan pasokan akibat cuaca

Komoditas hortikultura dan ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Curah hujan tinggi, gangguan transportasi maupun berkurangnya hasil tangkapan dapat menyebabkan pasokan berkurang dan mendorong kenaikan harga.

3. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah

Kota Sungai Penuh masih membutuhkan pasokan sejumlah komoditas dari daerah lain. Gangguan distribusi, kenaikan biaya angkutan dan hambatan pada jalur perdagangan dapat dengan cepat diteruskan menjadi kenaikan harga di tingkat konsumen.

4. Risiko kenaikan harga daging sapi

Harga daging sapi menunjukkan kecenderungan meningkat selama Triwulan I. Peningkatan permintaan pada periode tertentu dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga sehingga perlu dilakukan pemantauan pasokan dan distribusi.

5. Risiko kenaikan harga ikan

Harga ikan tongkol masih lebih tinggi dibandingkan Januari. Kondisi cuaca dan hasil tangkapan perlu terus dipantau karena dapat menyebabkan fluktuasi harga ikan.

6. Risiko kenaikan harga komoditas menjelang hari besar keagamaan

Peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri dapat menyebabkan tekanan harga pada komoditas pangan tertentu. Oleh karena itu, pemantauan stok, harga dan kelancaran distribusi perlu dilakukan secara lebih intensif.

7. Risiko biaya distribusi dan transportasi

Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, perubahan biaya transportasi dan distribusi berpotensi meningkatkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat konsumen.

G. Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

A. Gambaran Umum

Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat Kota Sungai Penuh. Permasalahan inflasi di daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan permintaan masyarakat, tetapi juga oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, struktur perdagangan, biaya transportasi serta perubahan harga komoditas pada daerah pemasok.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting selama Triwulan I Tahun 2026, kondisi harga di Kota Sungai Penuh secara umum relatif terkendali. Namun demikian, masih terdapat beberapa komoditas yang menunjukkan volatilitas harga cukup tinggi. Cabai merah keriting, misalnya, mengalami kenaikan rata-rata harga dari sekitar Rp30.433/kg pada Januari menjadi Rp39.286/kg pada Maret 2026. Sebaliknya, cabai rawit merah dan bawang merah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan inflasi Kota Sungai Penuh adalah **tingginya sensitivitas harga komoditas pangan tertentu terhadap perubahan pasokan dan distribusi**.

B. Identifikasi Permasalahan Utama

1. Ketergantungan terhadap Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Salah satu permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh adalah masih adanya ketergantungan terhadap pasokan sejumlah komoditas pangan dari luar daerah.

Ketergantungan tersebut menyebabkan harga di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi di daerah pemasok, biaya transportasi, jarak distribusi, kondisi jalan, cuaca serta kelancaran rantai pasok.

Apabila terjadi gangguan produksi atau distribusi di daerah pemasok, dampaknya dapat segera dirasakan melalui berkurangnya pasokan dan meningkatnya harga di pasar Kota Sungai Penuh.

Dengan demikian, penguatan produksi pangan lokal dan kerja sama perdagangan antardaerah menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan pangan daerah.

2. Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura

Komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah, masih menjadi kelompok komoditas yang memiliki volatilitas harga relatif tinggi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, cabai merah keriting menunjukkan kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara cabai rawit merah dan bawang merah justru mengalami penurunan yang cukup besar.

Perbedaan arah perubahan harga tersebut menunjukkan bahwa harga komoditas hortikultura sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar pada waktu tertentu.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena produksi hortikultura sangat dipengaruhi oleh musim, curah hujan, serangan hama dan penyakit tanaman, serta kontinuitas produksi petani.

3. Produksi Pangan Lokal Belum Sepenuhnya Mampu Menjamin Kontinuitas Pasokan

Produksi pangan lokal telah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemkot bersama Bank Indonesia sebelumnya juga telah mendorong penguatan ketahanan

pangan melalui pengembangan produksi padi dan pemberdayaan kelompok tani.

Namun, peningkatan produksi belum secara otomatis menjamin kontinuitas pasokan sepanjang tahun.

Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan produksi, luas tanam, produktivitas, ketersediaan benih dan sarana produksi, teknologi budidaya, akses pembiayaan, pascapanen serta kepastian pasar bagi petani.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui sektor produksi perlu diarahkan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada **pengaturan pola tanam dan kesinambungan pasokan**.

4. Rantai Distribusi dan Biaya Logistik

Biaya distribusi merupakan salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi harga barang di Kota Sungai Penuh.

Untuk komoditas yang berasal dari luar daerah, harga konsumen tidak hanya ditentukan oleh harga di daerah asal, tetapi juga oleh biaya pengangkutan, bongkar muat, penyimpanan, margin perdagangan dan risiko distribusi.

Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan biaya logistik dapat diteruskan menjadi kenaikan harga konsumen.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu memperhatikan **efisiensi rantai distribusi dari daerah pemasok sampai pasar Kota Sungai Penuh**, termasuk kemungkinan penguatan kerja sama antardaerah.

5. Belum Optimalnya Kerja Sama Antardaerah untuk Menjamin Pasokan

Kerja sama antardaerah memiliki peranan penting dalam menjamin kontinuitas pasokan komoditas pangan. Hal ini semakin penting bagi Kota Sungai Penuh karena sebagian kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.

Permasalahan yang perlu diperkuat adalah belum optimalnya pola kerja sama yang bersifat **business to business maupun government to government** dalam menjamin volume, waktu, harga dan kesinambungan pasokan komoditas strategis.

Ke depan, kerja sama antardaerah tidak cukup hanya berupa kegiatan seremonial, tetapi perlu diarahkan pada kesepakatan yang memiliki target komoditas, volume pasokan, periode pengiriman dan mekanisme distribusi yang jelas.

6. Keterbatasan Cadangan dan Buffer Stock Komoditas Strategis

Ketersediaan cadangan atau buffer stock merupakan faktor penting untuk menghadapi gangguan pasokan dan lonjakan permintaan.

Pada saat terjadi gangguan distribusi atau peningkatan permintaan, pemerintah daerah memerlukan instrumen intervensi yang dapat digunakan dengan cepat.

Kerja sama dengan Bulog menjadi salah satu instrumen penting. Pada Februari 2026,

Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perum Bulog Kanwil Provinsi Jambi melaksanakan pasar murah yang menyediakan beras, minyak goreng, gula, tepung dan bahan pangan lainnya dengan harga di bawah harga pasar.

Namun demikian, intervensi pasar perlu diposisikan sebagai **instrumen respons terhadap gejolak harga**, sedangkan penyelesaian jangka panjang tetap diarahkan pada penguatan produksi dan rantai pasok.

7. Volatilitas Harga Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

Permintaan masyarakat terhadap pangan cenderung meningkat menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional.

Pada kondisi tersebut, risiko kenaikan harga dapat meningkat apabila pertumbuhan permintaan tidak diikuti dengan peningkatan pasokan.

Hal ini menjadi perhatian khusus karena Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan Rakor TPID/Satgas Pangan dan sidak pasar menjelang Ramadan 1447 H sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga dan gangguan stok.

Dengan demikian, pengendalian inflasi perlu dilakukan **sebelum terjadi lonjakan harga**, melalui pemetaan kebutuhan dan ketersediaan stok sejak beberapa minggu sebelum periode permintaan tinggi.

8. Sistem Data Harga dan Informasi Pasar Masih Perlu Diperkuat

Pengendalian inflasi membutuhkan data harga dan stok yang cepat, akurat, konsisten dan terintegrasi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri telah menekankan pentingnya **early warning system dan data sharing antarinstansi** dalam strategi pengendalian inflasi.

Permasalahan yang perlu terus diperbaiki adalah bagaimana data harga dari berbagai perangkat daerah dapat disatukan menjadi satu basis data yang dapat digunakan untuk:

- mendeteksi kenaikan harga sejak dini;
- mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi;
- mengetahui kondisi stok;
- memetakan daerah asal pasokan;
- mengetahui margin distribusi;
- menentukan lokasi dan waktu intervensi; serta
- mengevaluasi efektivitas kebijakan TPID.

9. Belum Optimalnya Integrasi antara Data Harga dan Data Produksi

Data harga di pasar akan lebih bermanfaat apabila diintegrasikan dengan data produksi dan pasokan.

Misalnya, apabila harga cabai mulai meningkat, TPID perlu dapat mengetahui apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh berkurangnya produksi lokal, gangguan pasokan dari daerah pemasok, peningkatan permintaan atau faktor distribusi.

Tanpa integrasi data tersebut, respons pemerintah cenderung bersifat reaktif, yaitu melakukan intervensi setelah harga sudah mengalami kenaikan.

Oleh sebab itu, diperlukan sistem **early warning system berbasis komoditas** yang menghubungkan data harga, stok, produksi, distribusi dan konsumsi.

10. Koordinasi Lintas OPD dan Stakeholder Perlu Terus Diperkuat

Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab lintas sektor. TPID membutuhkan dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BPS, Bulog, Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.

Koordinasi tersebut sebenarnya telah berjalan melalui Rakor TPID/Satgas Pangan, sidak pasar dan berbagai kegiatan stabilisasi harga.

Namun, koordinasi ke depan perlu lebih diarahkan pada **pembagian tugas yang jelas berdasarkan komoditas dan permasalahan**, sehingga setiap gejolak harga dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.

11. Keterbatasan Instrumen Intervensi Harga di Tingkat Daerah

Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memengaruhi harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar.

Harga komoditas tertentu dipengaruhi oleh faktor nasional maupun eksternal seperti harga komoditas daerah pemasok, biaya transportasi, kondisi produksi dan perubahan permintaan.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada aspek yang memang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

ketersediaan pasokan – kelancaran distribusi – produksi lokal – informasi harga – kerja sama antardaerah – dan intervensi pasar pada kondisi tertentu.

12. Risiko Perilaku Spekulasi dan Penahanan Stok

Pada saat terjadi peningkatan permintaan atau muncul informasi mengenai potensi kelangkaan, terdapat risiko terjadinya penahanan stok atau spekulasi yang dapat memperbesar kenaikan harga.

Oleh karena itu, pemantauan tidak cukup dilakukan pada harga eceran, tetapi juga perlu mencakup kondisi stok pada tingkat distributor dan pedagang.

Pengawasan bersama Satgas Pangan, TPID dan perangkat daerah terkait diperlukan untuk memastikan tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

C. Akar Permasalahan Pengendalian Inflasi

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan pengendalian inflasi Kota Sungai Penuh dapat dikelompokkan menjadi empat akar masalah utama:

Aspek	Permasalahan Utama	Dampak
Ketersediaan	Ketergantungan pasokan dari luar daerah	Risiko kekurangan stok

Produksi	Produksi lokal dan kontinuitas produksi belum optimal	Pasokan tidak stabil
Distribusi	Biaya dan rantai distribusi relatif panjang	Harga konsumen lebih tinggi
Informasi	Data harga, stok dan produksi belum sepenuhnya terintegrasi	Respons kebijakan berpotensi terlambat
Permintaan	Lonjakan permintaan saat HBKN/Ramadan	Tekanan harga meningkat
Kelembagaan	Koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat	Intervensi belum selalu cepat
Pasar	Risiko spekulasi dan penahanan stok	Harga dapat meningkat tidak proporsional

D. Permasalahan Prioritas

Berdasarkan kondisi Triwulan I Tahun 2026, terdapat **lima permasalahan prioritas** yang perlu menjadi fokus TPID Kota Sungai Penuh:

Pertama, volatilitas harga komoditas hortikultura, terutama cabai, yang dapat berubah cukup cepat akibat faktor produksi dan cuaca.

Kedua, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga gangguan distribusi dapat langsung memengaruhi harga di Kota Sungai Penuh.

Ketiga, belum optimalnya kontinuitas produksi pangan lokal, sehingga produksi lokal belum sepenuhnya berfungsi sebagai penyangga ketika pasokan luar daerah terganggu.

Keempat, perlunya penguatan sistem data dan early warning system, sehingga potensi kenaikan harga dapat diketahui sebelum berkembang menjadi gejolak harga.

Kelima, perlunya memperkuat kerja sama antardaerah, terutama untuk komoditas yang pasokannya tidak dapat dipenuhi secara optimal dari produksi lokal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Gambaran Umum

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah, daya beli masyarakat dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 diarahkan pada strategi **4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif**.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan perkembangan harga dan stok, koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholder, pengawasan pasar, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan kegiatan intervensi apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga secara signifikan.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan

kondisi perkembangan harga komoditas strategis selama Januari, Februari dan Maret 2026, sehingga intervensi dapat diarahkan pada komoditas yang mengalami tekanan harga dan berpotensi memberikan dampak terhadap inflasi daerah.

B. Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Strategi 4K

1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pemantauan harga secara berkala pada pasar dan pedagang.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga komoditas strategis seperti:

- beras;
- cabai merah;
- cabai rawit;
- bawang merah;
- bawang putih;
- daging sapi;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- minyak goreng;
- gula pasir;
- ikan;
- kedelai; dan
- komoditas pangan strategis lainnya.

Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi TPID dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melaksanakan kegiatan stabilisasi harga melalui **Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah** dengan menyediakan komoditas pangan tertentu dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Pelaksanaan intervensi harga diarahkan terutama kepada komoditas yang mengalami kenaikan harga atau berpotensi mengalami gejolak akibat peningkatan permintaan, terutama menjelang dan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional.

2. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok komoditas pangan strategis melalui koordinasi dengan perangkat daerah, distributor, pedagang, Bulog dan stakeholder terkait.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa kenaikan harga tidak disebabkan oleh

kelangkaan atau terganggunya pasokan.

Dalam rangka memperkuat ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal, khususnya komoditas yang memiliki pengaruh terhadap inflasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, pemanfaatan lahan produktif, pengembangan komoditas hortikultura serta peningkatan koordinasi dengan kelompok tani dan pelaku usaha pertanian.

Selain meningkatkan produksi, kebijakan juga diarahkan pada pengaturan pola tanam dan kesinambungan produksi agar ketersediaan komoditas tidak hanya meningkat pada saat tertentu, tetapi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah Kota Sungai Penuh menyadari bahwa kelancaran distribusi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas harga.

Sebagian kebutuhan pangan Kota Sungai Penuh masih berasal dari luar daerah sehingga perubahan kondisi produksi, biaya transportasi, gangguan cuaca dan hambatan distribusi pada daerah pemasok dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, TPID melakukan koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Penguatan kerja sama antardaerah juga menjadi salah satu arah kebijakan yang perlu terus dikembangkan, terutama untuk komoditas yang belum dapat dipenuhi secara optimal melalui produksi lokal.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjamin:

1. ketersediaan volume pasokan;
2. kesinambungan pasokan;
3. kelancaran pengiriman;
4. kestabilan harga; dan
5. efisiensi rantai distribusi.

Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi pada harga akhir, tetapi juga melalui penguatan rantai pasok dari daerah produksi sampai ke konsumen.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi karena informasi yang cepat dan akurat dapat mencegah terjadinya kepanikan masyarakat maupun spekulasi pasar.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui TPID melakukan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perkembangan harga, stok, distribusi dan potensi risiko kenaikan harga.

Data hasil pemantauan harga digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi TPID untuk

menentukan langkah antisipasi dan intervensi.

Komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pangan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat menimbulkan panic buying.

C. Pemantauan Harga dan Stok

Selama Triwulan I Tahun 2026, pemantauan harga dilakukan secara rutin terhadap berbagai komoditas kebutuhan pokok dan barang penting.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas relatif stabil, sementara beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang cukup signifikan.

Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain:

- cabai rawit merah;
- bawang merah;
- kedelai;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- gula pasir; dan
- garam.

Sementara itu, beberapa komoditas mengalami kenaikan, terutama:

- cabai merah keriting;
- ikan tongkol; dan
- daging sapi.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi TPID dalam menentukan komoditas yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih lanjut.

D. Rapat Koordinasi dan Sinergi TPID

Dalam rangka memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait.

Rapat koordinasi menjadi forum untuk:

1. mengevaluasi perkembangan harga;
2. mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan;
3. mengevaluasi ketersediaan stok;
4. mengidentifikasi potensi gangguan distribusi;
5. merumuskan langkah intervensi;
6. membagi tugas antarinstansi; dan
7. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi.

Sinergi dilakukan antara TPID dengan perangkat daerah terkait, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Satgas Pangan, pelaku usaha, distributor serta stakeholder lainnya.

E. Pengawasan dan Sidak Pasar

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pemantauan dan pengawasan langsung ke pasar.

Sidak pasar dilakukan untuk memperoleh informasi aktual mengenai:

- harga komoditas;
- ketersediaan stok;
- kelancaran distribusi;
- kondisi perdagangan;
- potensi kelangkaan barang; dan
- kemungkinan adanya kenaikan harga yang tidak wajar.

Kegiatan pengawasan pasar juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

F. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah

Gerakan Pangan Murah dan/atau Pasar Murah merupakan salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga keterjangkauan harga masyarakat.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyediakan sejumlah komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan terutama pada periode ketika terjadi peningkatan permintaan, seperti menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ekspektasi harga dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan.

G. Penguatan Produksi Pangan Lokal

Dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Kebijakan diarahkan pada komoditas yang memiliki nilai strategis dalam pengendalian inflasi, khususnya komoditas hortikultura dan pangan yang memiliki tingkat konsumsi masyarakat tinggi.

Penguatan produksi lokal dilakukan melalui:

1. peningkatan produktivitas pertanian;
2. pemanfaatan lahan produktif;
3. pengembangan komoditas pangan strategis;
4. dukungan sarana produksi;
5. pendampingan kelompok tani;
6. penguatan kelembagaan petani;

pengembangan pemasaran hasil produksi; dan

7.
8. pengaturan pola tanam untuk menjaga kesinambungan pasokan.

H. Penguatan Kerja Sama Antardaerah

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga perlu terus memperkuat kerja sama antardaerah dalam rangka menjamin pasokan komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Kerja sama antardaerah diarahkan terutama kepada daerah yang menjadi sumber utama pasokan pangan Kota Sungai Penuh.

Kerja sama tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk:

- kerja sama pemerintah dengan pemerintah;
- kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha;
- kerja sama antarpelaku usaha;
- fasilitasi kontrak pasokan;
- penguatan jaringan distributor; dan
- kerja sama perdagangan komoditas strategis.

Dengan adanya kerja sama yang lebih terstruktur, diharapkan risiko kekurangan pasokan dan lonjakan harga akibat gangguan distribusi dapat diminimalkan.

I. Penguatan Early Warning System

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi ke depan diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini atau **early warning system**.

Sistem tersebut dibangun dengan memanfaatkan data:

1. perkembangan harga harian;
2. ketersediaan stok;
3. produksi pangan;
4. kebutuhan konsumsi;
5. distribusi komoditas;
6. kondisi cuaca;
7. harga di daerah pemasok; dan
8. perkembangan permintaan masyarakat.

Data tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi komoditas yang mulai menunjukkan kecenderungan kenaikan harga sebelum terjadi gejolak yang lebih besar.

Dengan pendekatan ini, TPID dapat melakukan tindakan preventif, bukan hanya melakukan intervensi setelah terjadi kenaikan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Gambaran Umum

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan

tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sungai Penuh untuk mengetahui efektivitas berbagai kebijakan dan langkah yang telah dilaksanakan dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil pemantauan perkembangan harga bulan Januari, Februari dan Maret 2026, pelaksanaan koordinasi TPID, pemantauan dan pengawasan pasar, kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta langkah-langkah penguatan ketersediaan dan distribusi pangan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang **cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga**, yang tercermin dari relatif stabilnya sebagian besar komoditas kebutuhan pokok serta terjadinya penurunan harga pada beberapa komoditas pangan strategis.

Namun demikian, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dan fluktuasi harga, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.

B. Evaluasi Berdasarkan Strategi 4K

1. Evaluasi Keterjangkauan Harga

Kebijakan keterjangkauan harga dilaksanakan melalui pemantauan harga secara rutin, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor, pengawasan pasar serta pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah.

Berdasarkan perkembangan harga Januari–Maret 2026, beberapa komoditas mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Cabai rawit merah mengalami penurunan sekitar 49,4 persen, bawang merah turun sekitar 23,4 persen, daging ayam ras turun sekitar 11,6 persen dan telur ayam ras turun sekitar 8,9 persen.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi harga pada sebagian besar komoditas pangan strategis relatif terkendali.

Meskipun demikian, harga cabai merah keriting mengalami peningkatan sekitar 29,1 persen dari Januari ke Maret. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan keterjangkauan harga belum sepenuhnya mampu menghilangkan volatilitas harga pada komoditas hortikultura.

Evaluasi:
Kebijakan keterjangkauan harga dinilai **cukup efektif**, namun perlu diperkuat dengan intervensi yang lebih cepat terhadap komoditas yang mulai menunjukkan tren kenaikan harga.

C. Evaluasi Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan merupakan faktor utama yang menentukan stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh.

Selama Triwulan I Tahun 2026, ketersediaan komoditas kebutuhan pokok secara umum berada dalam kondisi relatif aman. Hal tersebut tercermin dari stabilnya harga beras, minyak goreng, bawang putih dan beberapa komoditas lainnya.

Penurunan harga cabai rawit merah dan bawang merah juga menunjukkan bahwa pasokan

kedua komoditas tersebut pada periode tersebut relatif memadai.

Namun, Kota Sungai Penuh masih menghadapi permasalahan struktural berupa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi di daerah pemasok.

Evaluasi:
Kebijakan ketersediaan pasokan dinilai **cukup efektif dalam jangka pendek**, tetapi masih perlu penguatan dalam jangka menengah dan panjang melalui peningkatan produksi lokal, pengaturan pola tanam, penguatan cadangan pangan dan kerja sama pasokan antardaerah.

D. Evaluasi Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga harga barang di Kota Sungai Penuh karena sebagian kebutuhan masyarakat berasal dari luar daerah.

Koordinasi dengan distributor, pelaku usaha dan stakeholder terkait telah dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan dengan baik.

Stabilnya harga sejumlah komoditas seperti beras, bawang putih, minyak goreng dan tepung terigu menunjukkan bahwa distribusi pada komoditas tersebut relatif berjalan dengan baik.

Namun, masih terdapat fluktuasi pada komoditas seperti cabai dan ikan yang menunjukkan bahwa rantai pasok komoditas tertentu masih rentan terhadap perubahan kondisi produksi, cuaca dan biaya distribusi.

Evaluasi:
Kebijakan kelancaran distribusi dinilai **cukup efektif**, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kerja sama antardaerah, efisiensi rantai distribusi dan pemetaan daerah pemasok komoditas strategis.

E. Evaluasi Komunikasi Efektif

Komunikasi dan koordinasi merupakan instrumen penting dalam pengendalian inflasi karena memungkinkan TPID memperoleh informasi mengenai perkembangan harga, stok dan potensi gangguan pasokan secara lebih cepat.

Koordinasi TPID dengan perangkat daerah, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Satgas Pangan dan stakeholder terkait telah mendukung proses pemantauan dan pengendalian harga.

Pemantauan harga secara rutin juga memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun, sistem informasi ke depan perlu dikembangkan agar tidak hanya menyajikan harga, tetapi juga dapat mengintegrasikan data **harga, stok, produksi, distribusi dan kebutuhan masyarakat**.

Evaluasi:
Kebijakan komunikasi efektif dinilai **cukup baik**, namun masih diperlukan penguatan integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini atau *early warning system*.

F. Evaluasi Perkembangan Komoditas Strategis

Berdasarkan data harga Triwulan I Tahun 2026, evaluasi terhadap komoditas strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Komoditas	Perkembangan Jan–Mar 2026	Evaluasi
Beras	Relatif stabil	Pasokan dan harga terkendali
Bawang merah	Turun ±23,4%	Kebijakan/pasokan efektif
Bawang putih	Stabil	Pasokan relatif aman
Cabai merah keriting	Naik ±29,1%	Perlu perhatian khusus
Cabai rawit merah	Turun ±49,4%	Perkembangan sangat positif
Daging sapi	Naik ±1,5%	Relatif terkendali, tetap dipantau
Daging ayam ras	Turun ±11,6%	Harga terkendali
Telur ayam ras	Turun ±8,9%	Harga terkendali
Gula pasir	Turun ±2,8%	Relatif stabil
Minyak goreng	Stabil	Pasokan relatif aman
Kedelai	Turun ±13,8%	Harga terkendali
Ikan tongkol	Naik ±8,9%	Perlu pemantauan pasokan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan harga selama Triwulan I Tahun 2026 relatif terkonsentrasi pada beberapa komoditas tertentu, khususnya cabai merah keriting dan ikan tongkol.

G. Evaluasi Pelaksanaan Intervensi Pasar

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah merupakan salah satu instrumen intervensi yang digunakan untuk menjaga keterjangkauan harga masyarakat.

Kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta membantu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga.

Namun demikian, kegiatan intervensi pasar memiliki keterbatasan karena sifatnya lebih banyak memberikan dampak **jangka pendek**.

Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran, yaitu pada:

1. komoditas yang mengalami kenaikan signifikan;
2. lokasi yang mengalami tekanan harga;
3. periode menjelang HBKN;
4. masyarakat yang membutuhkan; dan
5. kondisi ketika mekanisme pasar mengalami gangguan pasokan.

Intervensi pasar sebaiknya tidak menjadi satu-satunya instrumen pengendalian inflasi, tetapi harus disertai dengan penguatan produksi dan distribusi.

H. Evaluasi Koordinasi TPID

Koordinasi TPID selama Triwulan I Tahun 2026 telah memberikan kontribusi terhadap pemantauan dan pengendalian harga melalui koordinasi antarperangkat daerah dan stakeholder.

Sinergi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, perangkat daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Satgas Pangan, distributor dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Namun, koordinasi ke depan perlu lebih diarahkan pada **tindakan berbasis komoditas**.

Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan harga cabai, maka TPID perlu segera menentukan:

- penyebab kenaikan;
- sumber pasokan;
- ketersediaan stok;
- kebutuhan daerah;
- alternatif daerah pemasok;
- kemungkinan intervensi;
- perangkat daerah penanggung jawab; dan
- batas waktu penyelesaian.

Dengan demikian, rapat koordinasi tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga menghasilkan **rencana aksi yang terukur dan memiliki penanggung jawab**.

I. Evaluasi Kerja Sama Antardaerah

Kerja sama antardaerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mengatasi permasalahan pasokan pangan.

Evaluasi Triwulan I menunjukkan bahwa penguatan kerja sama antardaerah masih perlu menjadi prioritas karena sebagian kebutuhan pangan Kota Sungai Penuh masih dipenuhi dari luar daerah.

Kerja sama ke depan perlu diarahkan kepada komoditas strategis yang memiliki volatilitas tinggi dan tingkat ketergantungan pasokan yang besar.

Kerja sama tidak hanya dilakukan pada saat terjadi kenaikan harga, tetapi dibangun sebelum terjadi gejolak melalui kesepakatan pasokan yang mencakup volume, periode, harga dan mekanisme distribusi.

J. Evaluasi Sistem Data dan Early Warning System

Pemantauan harga selama Triwulan I telah menghasilkan data perkembangan harga komoditas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren kenaikan dan penurunan harga.

Namun, sistem data masih perlu dikembangkan agar mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi inflasi.

Ke depan, sistem tersebut perlu menggabungkan:

Data Harga + Data Stok + Data Produksi + Data Distribusi + Data Permintaan + Data

Daerah Pemasok.

Dengan sistem tersebut, TPID dapat mengetahui sejak awal apabila suatu komoditas mulai menunjukkan indikasi kekurangan pasokan.

Sebagai contoh, apabila harga cabai mulai meningkat selama beberapa hari berturut-turut dan pada saat yang sama stok distributor mulai menurun, maka kondisi tersebut dapat dijadikan sinyal awal untuk melakukan intervensi sebelum kenaikan harga menjadi lebih besar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Strategi 4K

1. Keterjangkauan Harga

a. Meningkatkan pemantauan harga komoditas strategis

TPID Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan pemantauan harga secara rutin, khususnya terhadap komoditas yang memiliki volatilitas tinggi dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan inflasi pangan.

Komoditas prioritas yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- cabai merah keriting;
- cabai rawit merah;
- bawang merah;
- beras;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- daging sapi;
- ikan;
- gula pasir; dan
- minyak goreng.

Pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap harga eceran, tetapi juga terhadap **stok, harga tingkat distributor dan sumber pasokan**.

b. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara tepat sasaran

Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah dan/atau Operasi Pasar perlu dilaksanakan dengan prinsip **tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran**.

Intervensi tidak perlu dilakukan secara seragam terhadap seluruh komoditas, tetapi difokuskan kepada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan dan wilayah yang mengalami tekanan harga.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan praktik pengendalian inflasi daerah yang menempatkan GPM, operasi pasar dan stabilisasi pasokan sebagai instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga.

c. Menetapkan mekanisme respons cepat terhadap kenaikan harga

TPID perlu memiliki mekanisme atau *trigger* yang jelas. Misalnya, apabila suatu komoditas mengalami kenaikan harga secara berturut-turut atau melewati batas tertentu, maka dilakukan:

1. verifikasi harga;
2. pengecekan stok;
3. identifikasi penyebab;
4. koordinasi dengan distributor;
5. pencarian alternatif pasokan; dan
6. intervensi apabila diperlukan.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan sebelum kenaikan harga berkembang menjadi gejolak yang lebih besar.

---

2. Ketersediaan Pasokan

a. Memprioritaskan komoditas penyumbang risiko inflasi

Program produksi pangan daerah perlu lebih diarahkan kepada komoditas yang memiliki volatilitas harga tinggi.

Berdasarkan perkembangan harga Triwulan I Tahun 2026, cabai perlu menjadi salah satu komoditas prioritas.

Pemerintah daerah dapat mendorong:

- peningkatan luas tanam;
- peningkatan produktivitas;
- pengaturan pola tanam;
- penggunaan benih berkualitas;
- pengendalian hama dan penyakit;
- pengembangan demplot;
- pemanfaatan lahan pekarangan; dan
- penguatan kelompok tani.

b. Mengembangkan kalender produksi pangan

Dinas terkait bersama TPID perlu menyusun **kalender produksi komoditas strategis**, terutama cabai, bawang merah dan komoditas hortikultura lainnya.

Kalender tersebut digunakan untuk mengetahui:

- kapan produksi lokal meningkat;
- kapan terjadi masa panen;
- kapan diperkirakan terjadi kekurangan pasokan;
- kapan kebutuhan masyarakat meningkat; dan

kapan diperlukan pasokan dari luar daerah.

Dengan demikian, kebijakan produksi dapat disusun sebelum terjadi kekurangan pasokan.

c. Memperkuat cadangan pangan daerah

Ketersediaan cadangan pangan perlu diperkuat sebagai *buffer* apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan permintaan.

Cadangan pangan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi dampak gangguan distribusi dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperoleh sumber pasokan alternatif.

d. Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha

Pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Distributor, pedagang, kelompok tani, koperasi, BUMD dan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam pengamanan pasokan.

TPID dapat membangun forum komunikasi dengan pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai kondisi stok dan kebutuhan pasokan secara lebih cepat.

---

3. Kelancaran Distribusi

a. Memetakan rantai pasok komoditas strategis

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan pemetaan rantai pasok untuk komoditas strategis mulai dari:

daerah produksi → distributor → pedagang besar → pedagang eceran → konsumen.

Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui titik yang menyebabkan biaya distribusi tinggi serta mengidentifikasi jalur alternatif apabila terjadi gangguan.

b. Memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Kerja sama antardaerah perlu menjadi salah satu prioritas utama TPID Kota Sungai Penuh.

Kerja sama diarahkan kepada daerah yang menjadi sumber pasokan komoditas pangan Kota Sungai Penuh.

KAD sebaiknya tidak hanya berbentuk nota kesepahaman, tetapi diarahkan kepada kerja sama yang memiliki target konkret, seperti:

- jenis komoditas;
- volume pasokan;
- periode pasokan;
- harga acuan/indikasi harga;
- jadwal pengiriman;
-

pihak pemasok;
- pihak penerima; dan
- mekanisme penyelesaian apabila terjadi gangguan pasokan.

Penguatan kerja sama antardaerah dan distribusi pangan memang menjadi salah satu fokus kebijakan pengendalian inflasi nasional 2026.

c. Mengidentifikasi biaya logistik

TPID perlu melakukan pemetaan biaya transportasi komoditas dari daerah pemasok sampai Kota Sungai Penuh.

Apabila ditemukan biaya distribusi yang terlalu tinggi, dapat dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah pemasok dan pelaku usaha untuk mencari alternatif distribusi yang lebih efisien.

d. Menyiapkan jalur distribusi alternatif

Untuk komoditas yang sangat tergantung pada pasokan luar daerah, perlu disiapkan alternatif sumber pasokan.

Dengan demikian, apabila salah satu daerah pemasok mengalami gangguan produksi atau distribusi, pasokan dapat dialihkan ke daerah pemasok lainnya.

---

4. Komunikasi Efektif

a. Membangun dashboard harga dan stok

TPID perlu mengembangkan sistem informasi yang menyajikan secara sederhana dan cepat:

- harga harian;
- tren harga;
- stok;
- daerah asal pasokan;
- kondisi produksi;
- komoditas yang mengalami kenaikan;
- komoditas yang mengalami penurunan; dan
- status risiko inflasi.

Sistem tersebut dapat menjadi dasar **early warning system** TPID.

b. Menetapkan daftar komoditas prioritas pengawasan

Tidak seluruh komoditas perlu dipantau dengan tingkat intensitas yang sama.

TPID dapat menetapkan beberapa komoditas sebagai **komoditas prioritas pengendalian inflasi**, berdasarkan:

-

tingkat konsumsi masyarakat;
2. volatilitas harga;
3. ketergantungan terhadap pasokan luar daerah;
4. kontribusi terhadap inflasi; dan
5. kemampuan pemerintah melakukan intervensi.

c. Memperkuat komunikasi publik

Informasi mengenai harga dan ketersediaan pangan perlu disampaikan kepada masyarakat secara rutin.

Komunikasi publik dapat dilakukan untuk:

- mencegah kepanikan masyarakat;
- mencegah *panic buying*;
- memberikan informasi harga yang wajar;
- menyampaikan lokasi pelaksanaan GPM/Pasar Murah; dan
- menyampaikan kebijakan pemerintah apabila terjadi gejolak harga.

Komunikasi kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

C. Rekomendasi Khusus Berdasarkan Komoditas

Berdasarkan hasil pemantauan harga Triwulan I Tahun 2026, rekomendasi khusus komoditas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Komoditas	Kondisi Triwulan I	Rekomendasi
Cabai merah keriting	Harga meningkat	Perluasan tanam, pengaturan pola tanam dan pengamanan pasokan
Cabai rawit merah	Harga turun signifikan	Menjaga kontinuitas produksi dan mencegah harga jatuh di tingkat petani
Bawang merah	Harga turun	Menjaga kesinambungan produksi dan distribusi
Beras	Relatif stabil	Menjaga stok dan distribusi
Daging ayam ras	Harga menurun	Menjaga pasokan dan stabilitas distribusi
Telur ayam ras	Harga menurun	Menjaga ketersediaan pasokan
Daging sapi	Cenderung meningkat	Pemantauan stok dan pasokan
Ikan tongkol	Harga meningkat	Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi
Kedelai	Harga menurun	Menjaga pasokan bagi pelaku usaha
Gula	Cenderung menurun	Menjaga ketersediaan stok
Minyak goreng	Relatif stabil	Pengawasan stok dan harga

1.

D. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan TPID

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kota Sungai Penuh direkomendasikan untuk memperkuat mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Rapat TPID berbasis data

Rapat TPID perlu menggunakan data harga, stok, produksi dan distribusi sebagai bahan utama pembahasan.

2. Penetapan PIC komoditas

Setiap komoditas prioritas dapat memiliki perangkat daerah atau stakeholder yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan memberikan laporan secara berkala.

3. Rencana aksi yang terukur

Setiap hasil rapat TPID perlu dituangkan dalam rencana aksi yang memuat:

- permasalahan;
- tindakan;
- perangkat daerah penanggung jawab;
- stakeholder pendukung;
- target waktu;
- indikator keberhasilan; dan
- hasil pelaksanaan.

4. Evaluasi bulanan

Evaluasi tidak hanya dilakukan setiap triwulan, tetapi dilakukan secara bulanan terhadap komoditas yang memiliki risiko tinggi.

5. Penguatan sinergi dengan Bank Indonesia

Koordinasi dengan Bank Indonesia perlu terus diperkuat dalam aspek pengendalian volatile food, pengembangan produksi pangan, digitalisasi data, penguatan KAD dan peningkatan kapasitas TPID.

E. Prioritas Kebijakan Triwulan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026, terdapat **lima prioritas kebijakan** yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh:

Prioritas 1 — Pengamanan Pasokan Cabai

Cabai merah keriting perlu menjadi salah satu prioritas karena pada Triwulan I mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

Kebijakan diarahkan pada peningkatan produksi lokal, pengaturan pola tanam, penguatan pasokan dari daerah lain dan intervensi apabila terjadi gejolak harga.

Prioritas 2 — Penguatan Kerja Sama Antardaerah

KAD perlu diarahkan pada komoditas strategis yang paling banyak dipasok dari luar Kota Sungai Penuh.

Prioritas 3 — Penguatan Early Warning System

Data harga harian perlu dikembangkan menjadi sistem peringatan dini yang menghubungkan harga dengan stok dan kondisi pasokan.

Prioritas 4 — Penguatan Distribusi

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan rantai distribusi dan mengidentifikasi alternatif jalur maupun daerah pemasok untuk mengurangi risiko gangguan pasokan.

Prioritas 5 — Intervensi Tepat Waktu

GPM, Pasar Murah dan bentuk intervensi lainnya dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan prinsip **tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran**, bukan hanya berdasarkan jadwal kegiatan.

F. Matriks Rekomendasi Kebijakan

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama	Indikator
1	Pemantauan harga dan stok komoditas strategis	TPID/Dinas terkait	Data harga dan stok tersedia
2	Pengamanan pasokan cabai dan bawang	Dinas Pertanian/TPID	Ketersediaan pasokan meningkat
3	Gerakan Pangan Murah	Dinas Ketahanan Pangan/TPID	Harga komoditas terjangkau
4	Penguatan KAD	Bagian Perekonomian dan SDA/TPID	Kesepakatan pasokan terlaksana
5	Pemetaan rantai pasok	TPID/Dinas Perdagangan	Peta rantai pasok tersedia
6	Penguatan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan/Bulog	Stok penyangga tersedia
7	Early warning system	TPID/BPS/Dinas terkait	Peringatan dini tersedia
8	Pengawasan pasar	Dinas Perdagangan/Satgas Pangan	Gejolak harga terdeteksi cepat

9	Komunikasi harga kepada masyarakat	TPID/Diskominfo	Informasi harga tersampaikan
10	Evaluasi kebijakan	TPID	Rencana aksi dievaluasi berkala